

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN DALAM  
PENATAAN FORMASI TENAGA HONORER  
DI KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Yurike Maulina**

**NIM. 05040422120**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurike Maulina  
NIM : 05040422120  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam Penataan Formasi  
Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 9 April 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TERSEBUT'. The signature is stylized and includes the number '24'.

**Yurike Maulina**  
NIM. 05040422120

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yurike Maulina

NIM : 05040422120

Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam Penataan Formasi Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 9 April 2026  
Pembimbing,



**Dr. Achmad Yasim, M.Ag.**  
NIP. 196707271996031002



## PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yurike Maulina  
NIM : 05040422120  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : rikemaulina24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

*Analisis Fiqh Syasab Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam Penataan Formasi Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juni 2026

Penulis

( Yurike Maulina )

## ABSTRAK

Penataan formasi tenaga honorer merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa pegawai yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sehingga tenaga honorer perlu ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo masih menghadapi berbagai kendala, antara lain permasalahan validitas data, penyesuaian kebijakan daerah terhadap ketentuan pemerintah pusat, serta dampak terhadap tenaga honorer yang tidak lagi diperpanjang masa kerjanya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo ditinjau melalui perspektif *fiqh siyasah* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan model dalam bentuk hukum empiris melalui pendekatan *socio-legal*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu pejabat BKPSDM Kabupaten Situbondo serta tenaga honorer terdampak. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penataan formasi tenaga honorer di Kabupaten Situbondo telah dilakukan melalui pendataan, verifikasi administrasi, serta penyesuaian kebijakan kepegawaian daerah sesuai ketentuan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan berupa validitas data, proses penyelesaian penataan yang belum sepenuhnya tuntas, serta belum terpenuhinya batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang ASN. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab pemerintahan karena masih terdapat keterbatasan komunikasi kepada tenaga honorer terdampak, perbedaan dampak antara tenaga honorer yang terdata dan tidak terdata dalam database, serta perlindungan hak yang belum sepenuhnya seimbang selama masa transisi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan tenaga honorer di Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan penataan formasi tenaga honorer, khususnya dalam aspek pendataan, verifikasi administrasi, dan ketepatan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Selain itu, peningkatan transparansi dan penyampaian informasi kepada tenaga honorer perlu dilakukan agar setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik dan pelaksanaannya berjalan lebih tertib serta memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak tenaga honorer.

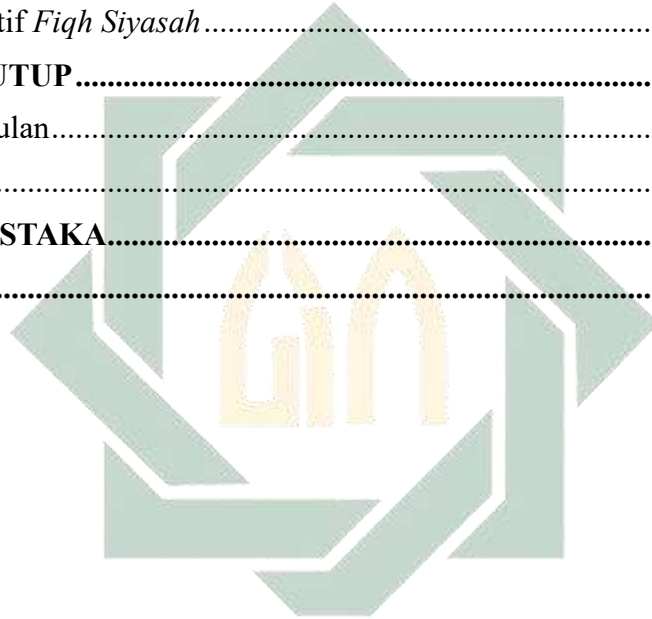
<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori .....	14
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KONSEP <i>FIQH SIYASAH</i> DAN KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>26</b>
A. Konsep <i>Fiqh Siyasa</i> .....	26
B. Konsep Kebijakan Publik.....	37
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .....	46
<b>BAB III IMPLEMENTASI PENATAAN FORMASI TENAGA HONORER DI KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN ....</b>	<b>55</b>
A. Profil Kabupaten Situbondo .....	55
B. Implementasi Penataan Formasi Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo menurut Perundang-Undangan.....	58
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN DALAM PENATAAN FORMASI TENAGA</b>	

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

<b>HONORER DI KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i></b> .....	<b>82</b>
A. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam Penataan Formasi Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo .....	82
B. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dalam Penataan Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo Ditinjau Melalui Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>108</b>

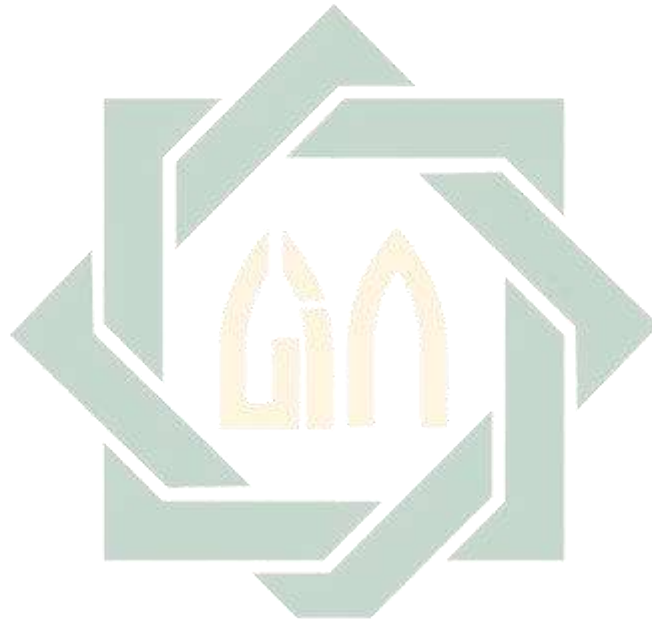


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Situbondo.....56

Gambar 2 Surat Edaran Pemberhentian Pegawai Non-ASN.....69



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-siyasah al-syar'iyah*. Kairo: al-Mu'assasah al-Arabiyyah, 1961.

Al-Mawardy, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Bahansi, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islam*. Mesir: Maktabah Daral-Umdah, 1965.

Bidara, Olden. *Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Teori dan Praktek Pemerintahan, dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Engkus, *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Bekasi: PT KimshafiAlung Cipta, 2022.

Hayatudin, Amrullah dan Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih*. Jakarta: Amzah, 2023.

H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia group, 2016.

Iriawan, Hermanu. *Teori Kebijakan Publik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinandan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.

Kallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Kendi, Ibrahim Kristofol. *Implementasi Kebijakan Publik Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024.

Manzhur, Ibn. *Lisan Al-Arab, Juz 6*. Beirut: Dar Al-Shadr, 1968.

Marbun, S.F. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Bandung, 2006), 24.

#### **Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Agustina Sely, Mohamad Bagas Rio R, dan Rahma Kemala Dewi. “Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”, *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5, No.2 (2021): 243.

Ali, Nurazhimah dan Syarifah Zulyaka Rifera Rozi, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (2026): 109-110.

Aryani, Laela. “Implementasi *good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Batur Raden Kabupaten Banyumas Persepektif *siyasah idariyyah*,” Skripsi, UIN Purwokerto, 2020.

Fadillah, Moch. Rizky. “Pangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Penataan Sistem Kepegawaian Berdasarkan Asas *equality before the law*” Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2024.

Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (Juli – Desember 2022): 113.

Hartono, Risma Shafari. “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Mengenai Kesederajatan PNS, PPPK dan Tenaga Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024.

- Hasibuan, Nur Hanipa. "Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Irwansyah dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*" *Jurnal:Cerdas Hukum* 2, no.1, (2023) :71.
- Jafar, Wahyu Abdul. "*Fiqh Siyasah* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20.
- Kuntari, Azhar Dhiaa dan Muhammad Nur Ihsan. "Pengaruh Figur Pemimpin Ideal terhadap Stabilitas Sosial Masyarakat (Studi Analisis dalam Kitab Sahih Muslim Bab Siyasah Imaroh), *AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits* 1, No. 2 (Oktober 2023): 110.
- Kurniawan, Rifki Dwi. "Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Maharaksa, Muhammad Sinathria. "Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya dalam Contoh Studi Kasus", *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (Juni 2025): 70.
- Marcyly, Lovi. "Perlindungan Tenaga Honorer dalam PP No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Iain Curup, 2024.
- Mutakdir, Mahmuddin, dan Tasmin Tangngareng, "*Al-Mas'ul 'An Ra'iyah* dalam Hadis Nabi SAW (Kajian Interpretasi Tekstual dan Kontekstual)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, No. 1, (2020): 60.
- Nilakandi, Keisha Adiana. "Kepastian Hukum Jaminan Kesejahteraan Guru Honorer Berdasarkan Pasal 99 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Perspektif *maslahah mursalah*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Pepuho, Agustina Pepuho dan Untung Muhdiarta. "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Jayapura," *Jurnal Kebijakan Publik* 4, no. 3 (2021): 144.
- Pujangga Radda, Relit Nur Edi, Dan Rudi Santoso. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”  
*Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 2 (April 2025): 27.

Rahmatushiva, Adilla. “Analisis Penataan Kepegawaian ASN di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada UU Nomor 20 Tahun 2023”  
*Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no.6 (2024):115.

Rozikin, dan Kandung Supto Nugroho. “Implementasi Kurikulum Merdeka pada SMP Negeri 1 Karangtanjung Kabupaten Pandeglang,” *terdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no. 2 (2025): 770.

Salsabila, Anisa Salsabila, Hartati, Dan Raden Sarwani. “Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Status Tenaga Honorer setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 2 (Juli 2025): 950.

Sari, Indah. “Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, No. 2 (2025): 9.

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”,  
*Administrative Law & Governance Journal* 2, No. 3 (August 2020): 553 -554.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

### **Data Elektronik**

Husdinariyanto Novi. “DPRD Situbondo Ungkap 70 Guru non-ASN Sertifikasi Diberhentikan,” Antara News Jawa Timur, akses 9 November 2025,  
<https://jatim.antaranews.com/berita/917109/dprd-situbondo-ungkap-70-guru-non-asn-sertifikasi-diberhentikan>.

Profil Kabupaten Situbondo, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 6 Maret 2026, di akses 27 April 2026

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten\\_Situbondo&oldid=29013356](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Situbondo&oldid=29013356).

Rahmawati, Dina. “Asal-usul Nama Situbondo, Pengganti Kabupaten Panarukan,” diakses 27 April 2026, <https://web.archive.org/web/20230220020109/https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6315230/asal-usul-nama-situbondo-pengganti-kabupaten-panarukan>.

Ridho, Akbar Abdullah dan Andi Hartik, “5.831 Honorer Situbondo Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Bupati Berharap Bisa Bekerja Optimal,” diakses 27 April 2026, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/09/16/223533478/5831-honorer-situbondo-diangkat-jadi-pppk-paruh-waktu-bupati-berharap-bisa>.

Supriyono, Edy. “5.444 Non-ASN Terverifikasi di Database Aplikasi BKN,” Radar Banyuwangi, 6 Oktober 2022, akses 12 Maret 2026, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/situbondo/75916931/5444-non-asn-terverifikasi-di-data-base-aplikasi-bkn>.

Surat Al-Ma’idah Ayat 49: *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online.

Surat Al-Ma’idah Ayat 8: *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online.

Surat An-Nisa’ Ayat 58: *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online.

Surat An-Nisa’ Ayat 59: *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online.

Surat Asy-Syura Ayat 38: *Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap* | Quran NU Online.

Widarsha, Chuk Shatu Widarsha. “600 Tenaga Honorer Pemkab Situbondo Diberhentikan,” akses 9 November 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7889529/600-tenaga-honorer-pemkab-situbondo-diberhentikan>.

Wisnubroto, Kristantyo. “Penataan Pegawai Non-ASN untuk Meningkatkan Kualitas Birokrasi,” diakses 9 November 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9078/penataan-pegawai-non-asn-untuk-meningkatkan-kualitas-birokrasi>.

**Wawancara**

Bayu Indra Wahyono, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Kota Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 15 Januari 2026.

Ghazi Faiz, Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2026.

Musdalifatul Makkiyah, Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 14 Februari 2026.

Siti Nafisah, Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2026.

Wildatul Afifah, Tenaga Honorer di Kabupaten Situbondo, *Wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2026.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A